

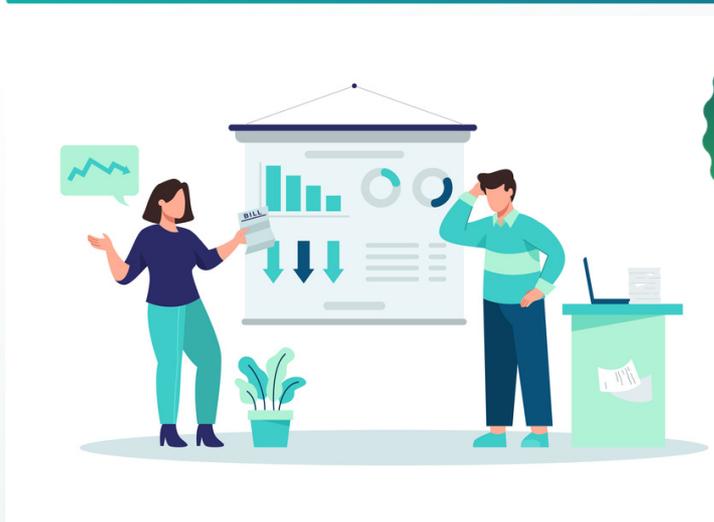
# Win The Ocean Podcast

## Edisi

## Nilai Ekonomi Karbon Merupakan Cara Solutif Untuk Mengurangi Emisi Karbon di Indonesia

Agus  
2023

Issue 34



Gas Efek Rumah Kaca merupakan permasalahan yang serius dihadapi di pemerintah seluruh Indonesia, bagaimana tidak kualitas udara yang tidak baik serta peningkatan polusi udara yang signifikan, lalu adanya pengurangan lahan kehutanan yang dimanfaatkan untuk pembangunan juga jadi pemicunya

Di Indonesia sendiri, menurut Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring Pelaporan Verifikasi (MPV) yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021, bahwa sejak 2019 sebanyak lebih dari 1 juta gigagram karbon dioksida ekuivalen (Gg CO<sub>2</sub>e) telah mencemari udara di Indonesia. Terhitung ada dua sektor besar yang menyumbang Gas Emisi Karbon yaitu sektor pemanfaatan hutan dan juga sektor energi.

Berkaca dari kasus tersebut negara di seluruh dunia termasuk Indonesia berkumpul untuk menyelesaikan masalah terkait pemanasan global dan terbitlah **Paris Agreement**. Isi dari Paris Agreement membahas bahwa setiap negara yang tergabung harus berpartisipasi untuk menurunkan Emisi Karbon, hal ini dikenal sebagai **Nationally Determined Contribution (NDC)**.

Indonesia mempunyai target NDC pada tahun 2030, yang mana harus dipenuhi segera. Maka dari itu perlu diadakan sebuah sistem yang mengatur penggunaan Emisi Karbon di Indonesia dan terciptalah Nilai Emisi Karbon (di bold) yang sudah ditentukan sesuai dengan Perpres 98/2021 dan Permen LHK 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

**Nilai Ekonomi Karbon** merupakan sistem yang mengatur penggunaan Emisi Karbon di suatu lembaga atau perusahaan. Sistem ini dinilai sangat efektif dan menguntungkan pelaku usaha, bagaimana tidak terdapat 4 mekanisme yang menjadi fondasi berjalannya Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia yaitu Perdagangan Karbon, Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan Atas Karbon, Mekanisme lain sesuai perkembangan IPTEK.

Pelaku usaha memiliki peran yang sangat besar dalam Nilai Ekonomi Karbon, apalagi jika kita melihat mekanisme Perdagangan Karbon (E-Newsletter Juli: Issue 33) yang menuntut pelaku usaha untuk memiliki peran lebih dalam berkontribusi pada Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menjadwalkan bahwa Perdagangan Carbon (Carbon Trading) akan diselenggarakan di Indonesia pada September 2023. Hal ini merupakan kesempatan bagus untuk pelaku usaha di Indonesia agar dapat berpartisipasi dalam Nilai Ekonomi Karbon.

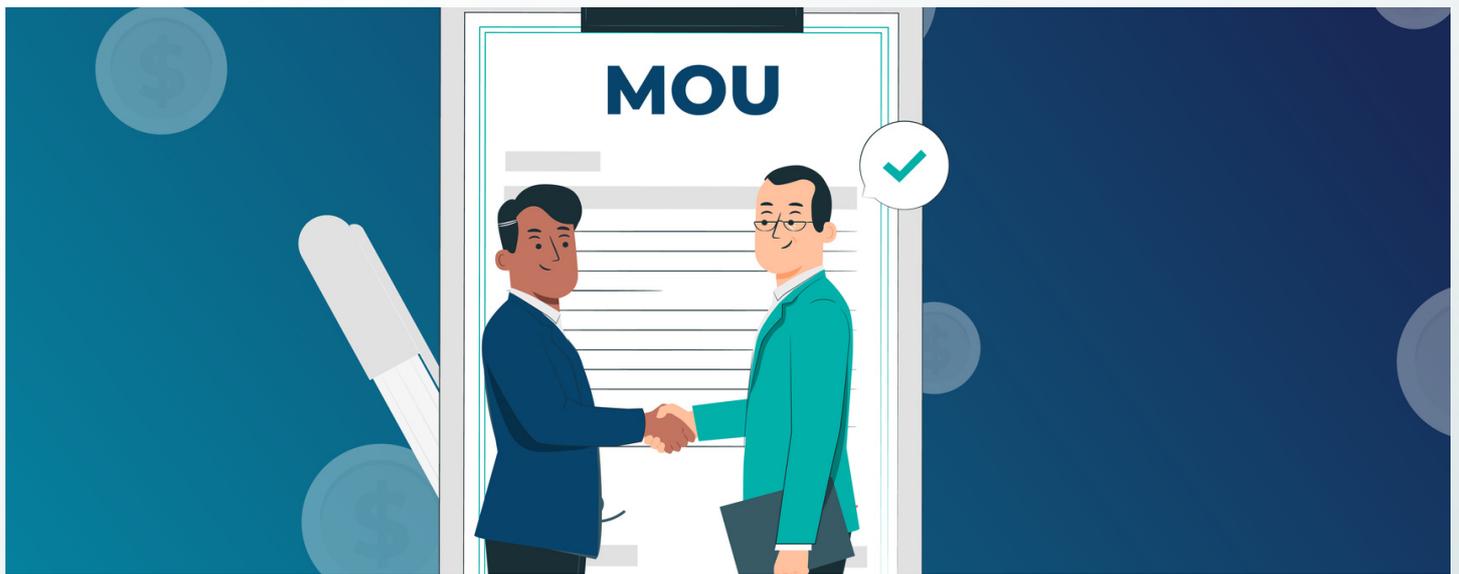
# Win The Ocean Podcast

## Edisi

Mendukung Pembangunan Nasional dan Memajukan Perekonomian Negeri PT BKI menjalin kerjasama dengan JAMDATUN

Agus  
2023

Issue 35



PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survey atau IDSurvey telah mengambil langkah penting untuk meningkatkan efektivitas hukum. Kolaborasi ini telah dilakukan melalui perjanjian bersama yang ditandatangani antara IDSurvey dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) pada Kamis, 10 Agustus 2023 bertempat di JW Marriott, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Feri Wibisono sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Arisudono sebagai Direktur Utama IDSurvey, dan jajaran direksi IDSurvey lainnya.

(Di era revolusi ini, transformasi menjadi hal yang krusial untuk mempercepat pertumbuhan sebuah perusahaan serta dapat berkontribusi kepada kemajuan negara. Oleh karena itu, IDSurvey telah menjalin kerjasama secara sinergis dengan JAMDATUN yang memiliki peran sentral dalam tindakan preventif terhadap kemungkinan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

“Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,” ujar Arisudono selaku Direktur Utama IDSurvey.

Lebih lanjut, Feri Wibisono sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengucapkan “Terima kasih atas kepercayaannya, kami akan terus menjaga kepercayaan sebaik-baiknya, apapun yang dibutuhkan BKI akan dengan senang hati kami mendistribusikannya. Oleh sebab itu pintu kerjasama antar lembaga dibutuhkan oleh IDSurvey yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN”

Dengan demikian, kolaborasi yang sudah dijalani antara PT BKI dengan JAMDATUN menjadi saluran penting bagi IDSurvey, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian untuk mendukung Pembangunan Nasional dan Memajukan Perekonomian Negeri.

# Win The Ocean Podcast

## Edisi

**BKI Resmi Menandatangani Surat Pembaruan Perjanjian Kerja Sama Terkait Pendelegasian Survey dan Sertifikasi**

Agus  
2023

Issue 36



Melalui surat edaran mengenai informasi teknis yang diterbitkan pada 14 Juli 2023, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) secara resmi menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait dengan pelaksanaan Survey dan Statutoria pada kapal-kapal berbendera Indonesia.

Dengan adanya informasi ini, ini tentu berita baik bagi perusahaan-perusahaan yang telah mempercayai jasa PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk menggunakan jasa survey dan sertifikasi statutoria. Terhitung wewenang ini sudah mulai efektif berjalan pada tanggal 11 Juli 2023.

Mengacu pada surat edaran bahwa surat perjanjian kerjasama ini berlaku lebih lama dari pada sebelumnya, sebelumnya surat perjanjian kerjasama ini hanya berlaku 1 tahun dan perusahaan yang mendapatkan wewenang untuk melakukan survey dan sertifikasi kapal harus memperpanjang kembali wewenang tersebut setiap 1 tahun sekali.

Tetapi untuk saat ini surat perjanjian kerja sama tersebut berlaku 2 tahun sekali, maka perusahaan yang mempunyai wewenang di haruskan memperpanjang surat perjanjian kerja sama setiap 2 tahun sekali.

Untuk wewenang mengenai statutoria kapal berbendera Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu:

- Kapal berbendera Indonesia dengan daerah pelayaran International
- Kapal berbendera Indonesia dengan daerah pelayaran Domestik

Pada surat edaran di jelaskan bahwa PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam **kapal berbendera Indonesia pelayaran International**. Wewenang jasa ini berlaku terhadap kapal - kapal berukuran 500GT atau lebih. Wewenang jasa PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) antara lain adalah

- 1974 Solas Convention, Protocol 88 And Other Mandatory Solas Instruments,
- Marpol 73/78 Convention,
- Anti Fouling System Convention, 2001,
- International Ballast Water Management,
- ILLC 1966 And Protocol 88

**Untuk kapal berbendera Indonesia khususnya pelayaran Domestik** di jelaskan mengenai jasa apa saja yang menjadi wewenang PT Biro Klasifikasi Indonesia di antaranya adalah:

- Peraturan Nasional Tentang Manajemen Keselamatan Kapal (PM 45 Tahun 2012 beserta perubahannya)
- Peraturan Nasional Tentang Keselamatan Kapal
- Peraturan Nasional Tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi (PM 61 Tahun 2019 beserta perubahannya)
- Peraturan Nasional Tentang Pencegahan Pencemaran Maritim (PM 29 Tahun 2014 beserta perubahannya)
- Peraturan Nasional Tentang Garis Muat (PM 39 Tahun 2016 beserta perubahannya)
- Peraturan Nasional Tentang Stabilitas Kapal (PM 44 Tahun 2021 beserta perubahannya)